



**PERSIAPAN DP4 PILKADA 2017**  
**Dindukcapil Data Penduduk Rentan**

**YOGYA (MERAPI)** - Persiapan awal untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) atau pemilihan walikota (Pilwalkot) Kota Yogyakarta pada 2017 mulai dilakukan. Dinas Penduduk dan Catatan Sipil (Dindukcapil) Kota Yogyakarta tahun ini akan mendata penduduk rentan. Pendataan tersebut terkait persiapan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4).

"Penduduk rentan kami data dan diselesaikan di tahun 2015. Penduduk rentan ini adalah penduduk yang sering berpindah-pindah dan tidak terdata di dokumen," kata Kepala Dindukcapil Kota Yogyakarta Sisruwadi, Minggu (12/4).

Dia mencontohkan penduduk rentan itu seperti memiliki domisili tinggal di Kota Yogyakarta tapi tidak masuk data penduduk kota. Menurutnya penduduk rentan di Kota Yogyakarta tidak banyak. Namun harus dicek untuk memastikan agar mereka terdata. Penduduk rentan itu biasanya tinggal di panti-panti maupun rumah singgah. "Cek domisilinya benar-benar di Kota Yogyakarta tidak atau sudah terdaftar di daerah lain. Kalau mereka domisili tetap di Yogyakarta akan kita daftar," imbuh mantan Camat Jetis itu.

Dia menyebut penduduk rentan itu di tahun 2014 juga sudah dilakukan dari program DIY. Oleh sebab itu tahun ini Dindukcapil menyelesaikan pendataan penduduk rentan tersebut. Jumlah penduduk Kota Yogyakarta ada sekitar 410.000 jiwa. Namun jumlah penduduk yang wajib KTP atau memiliki hak pilih sekitar 315.000 jiwa.

"Kami selesaikan penduduk rentan tahun ini dan tahun 2016 penyempurnaan datanya. Pada pemilu 2014 lalu DP4 di Kota Yogyakarta juga tidak bermasalah," paparnya.

Persiapan pilkada Februari 2017 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogyakarta sendiri juga sudah dilakukan. Selain menyusun anggaran, wacana pemungutan suara secara elektronik atau e-voting dalam pilkada 2017 terus dimatangkan.

"Kami sudah mengunjungi Badan Pengajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) di Jakarta untuk mempelajari alat e-votingnya. Kami masih terus melakukan kajian dari berbagai aspek untuk penerapan e-voting ini," tutur Ketua KPU Kota Yogyakarta, Wawan Budiyanto.

Alat e-voting yang dimiliki BPPT sudah diterapkan di sejumlah pemilihan kepala desa di Bali dan Jawa Tengah. Menurutnya alat e-voting itu sangat sederhana dan mudah penggunaannya sehingga masyarakat mudah mengadopsinya.

Dia menyebut sistem e-voting yang dikembangkan bersifat lokal yakni hanya mensubstitusi dari mencoblos menjadi e-voting. Data hasil pemungutan suara ada dan dokumen tetap ada. Meski demikian pengadaan alat itu dia bilang cukup mahal. Namun alat itu dapat digunakan beberapa kali pemilihan sehingga akan lebih hemat anggaran.

"Kami akan menggandeng perguruan tinggi untuk mengkaji bersama pelaksanaan pilkada dengan e-voting," tambahnya.

Pemungutan suara dengan e-voting sudah memiliki dasar hukum peraturan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 147/PUU-VII/2009. Selain itu Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur dan walikota. E-voting yang diterapkan juga tidak bertentangan dengan asas pemilu yakni asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

(Tri-m

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kependudukan dan Catatan	Netral	Amat Segera	Untuk Diketahui
2. Sekretariat Komisi Pemilihan U			

Yogyakarta, 17 Juni 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005